

ABSTRAK

POLITIK HUKUM PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2019 DAN NOMOR 3 TAHUN 2020 BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

Pengaturan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia dan peralatan. Pada peraturan ini ada batasan yang tegas dalam penyelenggaraan rumah sakit dimana ada sembilan layanan spesialis yang tidak boleh melakukan pelayanan di rumah sakit kelas C maupun kelas D. Pengaturan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 lebih dititik beratkan berdasarkan pada jumlah kepemilikan tempat tidur, sedangkan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit tidak ada pembatasan layanan spesialis tertentu harus dikelas rumah sakit tertentu, di peraturan menteri ini pelayanan farmasi dikelompokkan pada pelayanan non medis.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini memakai pendekatan normatif empiris dengan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian deskriptif analitis studi kasus dengan menggunakan sumber data primer, sekunder maupun tersier teknik pengumpulan data memakai studi kepustakaan, respon masyarakat dan wawancara. Data yang didapat dianalisa secara kualitatif induktif.

Hasil temuan penelitian yang didapatkan adalah, 1. Pengaturan klasifikasi rumah sakit pada peraturan menteri kesehatan nomor 30 tahun 2019 berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan, dan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan. Disini ada batasan tegas tentang jenis dan layanan spesialistik yang boleh melakukan pelayanan di kelas tertentu. 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 diundangkan dengan tujuan untuk menjawab tantangan perkembangan dan kebutuhan hukum.. Klasifikasi kemampuan pelayanan rumah sakit berdasarkan kompetensi tenaga kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit. Kelas Rumah Sakit lebih dititik beratkan pada jumlah tempat tidur, baru melihat pelayanan, Sumber Daya Manusia, bangunan dan prasarana, serta peralatan. Pelayanan Farmasi dimasukkan dalam Pelayanan Non Medik, Penyelenggaraan Rumah Sakit, masalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas Rumah Sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit, tanpa memandang kelas rumah sakit. 3. Pengaturan klasifikasi rumah sakit yang berbasis keadilan bermartabat memperhatikan dan menempatkan nilai, norma dan tujuan pengaturan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sebagai pokok landasan dalam menyusun kriteria pengaturan klasifikasi rumah sakit.

Kata kunci : pengaturan klasifikasi, keadilan bermartabat

ABSTRACT

LEGAL POLITICS REGULATION ON HOSPITAL CLASSIFICATION BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NUMBER 30 YEAR 2019 AND NUMBER 3 YEAR 2020 BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Hospital classification is based on the Minister of Health Regulation number 30 of 2019 based on the criteria for buildings and infrastructure, service capabilities, human resources and equipment. In this regulation, there are strict limits in the operation of the hospital where there are nine specialist services that are not allowed to carry out services in class C and class D hospitals. On the other hand, the operation of hospital services has no restrictions on certain specialist services that must be classified as a particular hospital. In this ministerial regulation, pharmaceutical services are grouped into non-medical services.

The research method used in this paper is a normative empirical approach with a constructivist paradigm with a descriptive analytical case study type of research using primary, secondary and tertiary technique data sources. Data collection uses library research, community response and interviews. The data obtained were analyzed qualitatively and inductively.

The results of the research are, 1. Arrangement of hospital classification in the minister of health regulation number 30 of 2019 based on the criteria for building and infrastructure, service capabilities, human resources and equipment, and in order to provide tiered health services and referral functions. Here there are strict limits on the types and specialized services that are allowed to serve in certain classes. 2. Regulation of the Minister of Health number 3 of 2020 is promulgated with the aim of responding to developmental challenges and legal needs. The classification of hospital service capabilities is based on the competence of health personnel owned by hospitals. Hospital class focuses more on the number of beds, just looking at services, Human Resources, buildings and infrastructure, and equipment. Pharmacy services are included in Non-Medical Services, Hospital Administration, the problem of providing certain health services is not limited to certain hospital classes, but can be carried out in all hospitals, regardless of hospital class. 3. Hospital classification arrangements based on justice and dignity pay attention to and place the values, norms and objectives of the organization of hospital services as the basis for formulating criteria for hospital classification arrangements.

Keywords: classification arrangement, dignified justice